

Putra Presiden AS Terpilih Joe Biden Diinvestigasi dalam Kasus Pajak

WASHINGTON(IM)- Putra Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden, Hunter Biden, menyatakan bahwa masalah pajaknya sedang dalam investigasi.

Investigasi itu dilakukan oleh kejaksaan federal di Delaware. Hunter Biden mengatakan dia menanggapi kasus itu "dengan sangat serius" tetapi yakin "tinjauan objektif" akan menunjukkan bahwa dia telah menanggapi urusannya "secara legal dan tepat".

Tim transisi Biden-Harris mengatakan presiden terpilih sangat bangga dengan putranya. "Hunter telah berjuang melalui tantangan yang sulit, termasuk serangan pribadi yang keji dalam beberapa bulan terakhir, hanya untuk muncul lebih kuat," papar pernyataan tim transisi Biden.

Hunter Biden mengatakan dia mengetahui penyelidikan itu pada Selasa. Dia tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut. Pria berusia 50 tahun itu sering menjadi sasaran kritik Partai Republik selama kampanye pemilu 2020, dengan fokus pada urusan bisnisnya di

Ukraina dan China ketika Joe Biden menjadi wakil presiden di pemerintahan Barack Obama.

Desember lalu, Presiden Donald Trump dimakzulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Partai Demokrat karena dituduh menyalahgunakan kekuasaan untuk menekan Ukraina menyelidiki keluarga Biden.

Tapi Trump diselamatkan dari pemakzulan itu oleh Senat yang dikuasai Partai Republik pada Februari.

Investigasi baru dalam urusan pajak Hunter Biden datang saat ayahnya menyusun kabinetnya. "Jika kasus ini masih berlangsung saat Biden dilantik bulan depan, jaks agung yang dipilihnya mungkin akan mengawasi penyelidikan tersebut," ungkap laporan AP.

Kasus pajak Hunter Biden ini diselidiki saat Presiden AS Donald Trump menolak menguak kekehalannya dalam pemilu presiden. Trump tampaknya ingin meninggalkan kasus itu sebagai kritik Partai Republik selama kampanye pemilu 2020, dengan fokus pada urusan bisnisnya di

Sekjen PBB Mendorong Setiap Orang Divaksinasi

WASHINGTON (IM)- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan akan melakukan vaksinasi Covid-19 secara terbuka. Menurut Guterres, hal itu merupakan kewajiban moral terhadap seluruh masyarakat. "Tentu saja, saya bermaksud menerima vaksin ketika tersedia untuk saya dalam situasi apa pun yang dapat dibenarkan untuk itu. Dan tentu saja saya tidak ragu melakukannya di depan umum," kata Guterres dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (9/12), dikutip kantor berita Xinhua.

Dia mendorong setiap orang untuk divaksinasi. Sebab hal itu tidak hanya penting bagi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar. "Masing-masing dari kita yang divaksinasi memberikan layanan kepada seluruh masyarakat karena kita tidak lagi menyebarkan, tidak ada risiko penyebaran penyakit. Jadi vaksinasi bagi saya adalah kewajiban moral dalam hubungannya dengan kita semua," ujar Guterres.

Dia pun mengulangi seruan agar vaksin menjadi barang publik global yang tersedia di mana pun, khususnya Afrika. "Sebagian besar negara Afrika kekurangan pembiayaan untuk menanggapi krisis secara memadai, sebagian karena penurunan

permintaan dan harga ekspor komoditas mereka," ucapnya.

Menurut Guterres, jika Afrika tidak didukung dengan memadai, dunia tidak akan mampu memerangi pandemi secara efektif. Dia berpendapat, satu-satunya cara memastikan negara-negara memperoleh vaksin adalah dengan memastikan inisiatif Covax dibiayai dan menghimpun dana 4,2 miliar dolar AS yang dibutuhkan dalam dua bulan ke depan.

Covax adalah inisiatif global yang bertujuan bekerja sama dengan produsen vaksin guna memberikan akses adil kepada negara-negara di seluruh dunia atas vaksin aman dan efektif. Menurut Guterres ada upaya besar oleh beberapa negara untuk memastikan vaksin bagi populasinya sendiri. "Tapi Covax bekerja keras. Ada beberapa vaksin yang disiapkan Covax dan sangat mungkin diberikan jika pembiayaannya terjangkau," kata Guterres.

Beberapa negara seperti Inggris, Kanada, dan Bahrain telah menyetujui penggunaan vaksin Covid-19 yang dikembangkan Pfizer-BioNTech. Kedua perusahaan farmasi itu menyatakan uji klinis fase terakhir menunjukkan vaksin yang mereka kembangkan memiliki keefektifan 95 persen. ● **ans**



IDN/ANTARA

JELANG PERAYAAN NATAL DI MEXICO CITY

Seorang wanita pelayan toko merapikan pakaian yang dipakaikan ke boneka yang merepresentasikan bayi Yesus dan memakai masker pelindung untuk mempromosikan pemakaian masker sebagai tindakan pencegahan penyebaran penyakit virus korona (Covid-19) sebelum perayaan Natal, di dalam sebuah toko di Mexico City, Meksiko, Rabu (9/12).

153 Negara Desak Israel 'Meninggalkan' Senjata Nuklir

Resolusi "Risiko Proliferasi Nuklir di Timur Tengah" memiliki 153 suara pendukung, dan hanya enam negara yang tidak mendukung, dengan 25 abstain.

NEW YORK (IM) - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) mendesak Israel meninggalkan kepemilikan senjata nuklir. Resolusi "Risiko Proliferasi Nuklir di Timur Tengah" memiliki 153 suara pendukung, dan hanya enam negara yang tidak

mendukung, dengan 25 abstain. Amerika Serikat (AS), sekutu Israel, termasuk di antara enam negara yang tidak memberikan suara untuk resolusi tersebut. Resolusi tersebut merupakan bagian dari paket besar resolusi yang disetujui PBB terkait dengan perlucutan sen-

jata nuklir, secara global dan di Timur Tengah.

Berdasarkan resolusi tersebut, PBB meminta Israel, "Tidak mengembangkan, memproduksi, menguji atau memperoleh senjata nuklir."

Selain itu, PBB menyeru Israel, "Untuk melepaskan kepemilikan senjata nuklir dan menempatkan semua fasilitas nuklir yang tidak dijaga di bawah pengamanan lembaga sebagai langkah penting membangun kepercayaan di antara semua negara di kawasan dan sebagai langkah menuju meningkatkan perdamaian dan

keamanan."

Dari 193 negara anggota PBB, sebanyak 191 negara merupakan bagian dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir. Israel tidak pernah menandatangani perjanjian itu.

Resolusi ini lolos dengan 152 suara mendukung, 6 suara menolak, dengan 24 suara abstain tahun lalu. Pada Senin lalu, PBB juga memberikan suara 174 mendukung, 2 suara menolak, dengan satu abstain, pada resolusi yang menyerukan zona bebas nuklir di Timur Tengah. Hanya Israel dan AS yang menentanginya, dengan Kame-

run abstain.

Israel diyakini memiliki senjata nuklir meski tak pernah mendeklarasikan kepemilikan senjata pemusnah massal itu. Rezim Zionis pun diyakini sebagai satu-satunya yang memiliki senjata nuklir di Timur Tengah.

AS menjadi pendukung dan pemasok utama persenjataan untuk Israel. AS pun terus menjaga keunggulan persenjataan Israel di kawasan Timur Tengah.

Times of Israel melaporkan pada 2013 bahwa Israel memiliki sekitar 80 hulu ledak nuklir. ● **tom**

Diborong Negara Kaya, 10 Negara Miskin Tidak Dapat Vaksin Tahun Depan

LONDON(IM)- Sembilan dari 10 orang di negara miskin tidak akan mendapatkan vaksin pada tahun depan. Itu karena negara kaya akan memborong banyak vaksin sesuai dengan kebutuhan mereka. Negara miskin Negara kaya yang memiliki 14% dari populasi global justru memborong 53% dari total vaksin yang menjanjikan pada bulan-bulan. Hal itu diungkapkan People's Vaccine Alliance, koalisi yang terdiri dari Oxfam, Amnesty International dan Global Justice Now. Mereka pun menuntut keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dunia baik kaya dan miskin.

Mereka mengatakan perusahaan farmasi yang bekerja mengembangkan vaksin seharusnya membuka data hak kekayaan intelektual dan teknologi dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO). "Seharusnya tidak boleh ada pertarungan antar negara untuk mengamankan dosis vaksin yang cukup," jelas Mohga Kamal-Yanni, penasihat People's Vaccine Alliance (PVA), kepada Reuters.

"Selama masa yang tidak pasti saat pandemic global, kehidupan rakyat dan kehidupan seharusnya diutamakan dibandingkan keuntungan perusahaan farmasi," kata Kamal-Yanni. PVA mengungkapkan, di saat kelompok rentan sudah mendapatkan vaksin pada Selasa lalu di Inggris, Sebagian besar orang manula di Bhutan, Ethiopia, dan Haiti cenderung tertinggal. Tiga vaksin yang telah mengumumkan efisiensi dan efektivitasnya yakni Moderna dan Pfizer telah diborong oleh negara kaya.

Sedangkan AstraZeneca dan Universitas Oxford justru berjanji akan menyediakan 64% dosis vaksin mereka untuk negara berkembang. Itu akan menjangkau 18% populasi dunia pada tahun depan. Vaksin tersebut dikenal lebih murah dan lebih mudah disimpan sehingga memudahkan dalam proses distribusi.

PVA menggunakan data informasi sains dan perusahaan analisis Airtfinity untuk menganalisis kesepakatan antara negara dan delapan kandidat vaksin, termasuk Sinovac dari Tiongkok dan Sputnik V dari Rusia.

Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jepang, Swiss, Australia, Hong Kong, Makau, Selandia Baru, Israel dan Kuwait sudah mengakuisisi 53% dosis vaksin. Oxfam mencatat bahwa Kanada membeli vaksin yang mampu memvaksin sebanyak lima kali untuk penduduknya.

Dengan membeli mayoritas vaksin suplai vaksin dunia, negara kaya sudah melanggar kewajiban menghormati hak asasi," kata Steve Cockburn, Kepala Keadilan Sosial dan Ekonomi Amnesty International.

Sebelum sudah ada komitmen vaksin yang disebut dengan Covax untuk mengamankan lebih dari 700 juta dosis vaksin untuk didistribusikan kepada 92 negara berpendapatan rendah. Namun, APV menyebutkan komitmen tersebut tidak cukup. Mereka menuntut agar alih teknologi produksi vaksin bisa dilakukan sehingga vaksin bisa diproduksi lebih banyak.

"Seharusnya tidak boleh ada blockade vaksin untuk menyelamatkan kehidupan orang karena banyak negara yang tidak memiliki uang," kata Manajer Kebijakan Kesehatan Oxfam, Anna Marriott. "Meskipun ada perubahan drastis, miliaran orang di dunia tidak akan mendapatkan vaksin yang aman dan efektif untuk Covid-19 yang bisa masih bisa bertahan dalam beberapa tahun mendatang," katanya.

Sementara itu, seorang nenek di Inggris menjadi orang pertama di dunia yang mendapatkan vaksin Covid-19, Pfizer. Margaret Keenan, dari Enniskillen, mengatakan bahwa dia merasa "sangat terhormat" menerima suntikan vaksin di Rumah Sakit Universitas Coventry. Keenan, yang akan berulang tahun ke-91 minggu depan mengatakan vaksin itu, merupakan hadiah awal ulang tahun terbaik.

Keenan divaksin sebagai program dari 800.000 dosis vaksin Pfizer/BioNTech yang akan diberikan dalam beberapa minggu ke depan. Sekitar empat juta orang dijadwalkan akan divaksin pada akhir bulan ini. Berbagai fasilitas kesehatan di Inggris akan memberikan vaksinasi kepada mereka yang berusia di atas 80 tahun, serta para petugas kesehatan. Langkah pertama vaksinasi ditunjukkan untuk melindungi mereka yang paling rentan.

Menteri Kesehatan Matt Hancock, yang menyebut hari Selasa (8/12) ini sebagai hari Vaksin, mengatakan vaksinasi ini merupakan penghormatan atas upaya ilmiah dan kemanusiaan serta kerja keras banyak orang. "Hari ini menandai dimulainya langkah memerangi musuh bersama, virus corona," kata Hancock.

Hancock mengatakan vaksinasi ini merupakan tugas dengan "tantangan logistik begitu besar", termasuk menyimpan vaksin pada suhu -70C serta perlunya satu orang mendapat dua dosis dengan dosis kedua setelah 21 hari. Menteri kesehatan Inggris ini juga mengatakan vaksin-vaksin ini diberikan di rumah sakit-rumah sakit pada minggu ini dan pekan depan akan diperluas di tempat praktik dokter. Begitu ada lagi persetujuan vaksin-vaksin lain, kata Hancock, vaksinasi akan diberikan secara massal di gedung olah raga atau gedung-gedung pertemuan. ● **gul**

Rudal Anti-Tank di Libya Disebut Mirip Rudal Dehlahiev Iran

NEW YORK CITY(IM)- Analisis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap foto empat rudal anti-tank di Libya menemukan bahwa salah satunya memiliki karakteristik yang konsisten dengan rudal Dehlahiev yang diproduksi Iran. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam laporannya kepada Dewan Keamanan (DK) PBB.

Namun, kata Guterres dalam laporan dua tahunannya yang diserahkan ke DK PBB Senin malam, Sekretariat PBB tidak dapat memastikan apakah rudal anti-tank ini telah dipindahkan ke Libya, yang berarti melanggar sanksi DK PBB terhadap Iran.

DK PBB yang beranggotakan 15 orang melarang ekspor senjata dalam resolusi DK PBB, pembatasan senjata dicabut pada Oktober tahun ini.

Israel menuduh Iran melanggar sanksi dan mengirimkan foto rudal anti-tank di Libya ke Guterres pada Mei lalu. Hanya beberapa minggu kemudian, Iran menulis surat kepada Guterres dan dengan tegas menolak klaim Israel sebagai tuduhan yang sama sekali tidak berdasar.

Israel mengatakan foto-foto itu muncul pada November 2019 dan bahwa senjata itu digunakan oleh milisi yang terkait dengan Tentara Nasional Libya (LNA) pimpinan Khalifa Haftar. LNA bermusuhan dengan pasukan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional. "Berdasarkan analisis Sekretariat dari foto-foto yang disediakan, Sekretariat menetapkan bahwa salah satu dari empat rudal anti-tank memiliki karakteristik yang konsisten dengan Dehlahiev yang diproduksi Iran, meskipun tidak ada tanggal produksi untuk peluru kendali

anti-tank ini yang terlihat," kata Guterres dalam laporannya. "Sekretariat tidak dapat memastikan apakah peluru kendali anti-tank ini telah dipindahkan ke Libya dengan cara yang tidak sesuai dengan resolusi 2231 (2015)," lanjut laporan itu, seperti dikutip Reuters, Rabu (9/12).

Guterres melaporkan dua kali setahun ke DK PBB tentang implementasi resolusi 2015. Libya juga telah menjadi sasaran embargo senjata PBB sejak 2011. Para ahli independen PBB melaporkan secara terpisah kepada DK PBB tentang implementasi langkah-langkah tersebut. Guterres juga mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa—berdasarkan analisis fotografi—476.000 butir amunisi 7,62 mm, yang disita oleh pasukan Australia pada Juni 2019 di perairan internasional di lepas Teluk Oman, tampaknya tidak diproduksi oleh Iran. ● **ans**

Jepang Perpanjang Keringanan Pajak Bagi Investasi Hijau

TOKYO(IM) - Jepang akan memperpanjang keringanan pajak pada mobil rendah emisi dan menawarkan insentif untuk mempromosikan investasi hijau. Langkah ini ditempuh untuk membantu Perdana Menteri Yoshihide Suga mencapai target netralitas karbon pada tahun 2050.

Langkah tersebut tercantum dalam proposal reformasi pajak yang disetujui, Kamis (10/12). Mengikuti Uni Eropa, China, dan 60 negara lainnya, Suga sudah berjanji mulai 2050 Jepang tidak akan lagi memproduksi gas rumah kaca. Koalisi partai berkuasa menyetujui ambisi Suga yang diumumkan pada Oktober

lalu. Anggota parlemen mengatakan proposal reformasi pajak tahun fiskal 2021 fokus pada upaya mendorong perusahaan berinvestasi pada teknologi hijau.

Proposal tersebut juga mendorong perpanjangan keringanan pajak bagi mobil-mobil rendah emisi dan memberikan insentif pada baterai lithium-ion yang digunakan mobil listrik. Partai berkuasa Liberal Democratic Party (LDP) dan sekutunya Partai Komeito sudah memfinalisasi proposal tersebut. Proposal tersebut akan mewardahi kebijakan-kebijakan pajak pemerintah pada tahun fiskal tahun depan yang dimulai pada April. Koalisi partai berkuasa juga

mendorong langkah untuk meringankan dampak pandemi virus corona yang memukul keras rumah tangga dan bisnis seperti keringanan pajak pada cicilan rumah dan bahan bakar jet.

Rencana pajak ini mengikuti keputusan Jepang memasukkan dukungan terhadap inovasi digital dan investasi hijau pada stimulus ekonomi sebesar 708 miliar dolar AS. Pemerintah Suga memandang inovasi hijau sebagai area utama yang dapat mendorong perekonomian yang merosot karena pandemi. Penjualan mobil Jepang sudah mulai bangkit dari dampak pandemi tapi mereka cukup tertinggal dalam pengembangan mobil listrik. ● **tom**



IDN/ANTARA

STARSHIP SN8 MELEDAK SAAT PERCOBAAN MENDARAT

Roket SpaceX pengangkat berat pertama Starship SN8 meledak saat percobaan mendarat kembali setelah diluncurkan dari fasilitas mereka dalam uji coba terbang di Boca Chica, Texas, Amerika Serikat, Rabu (9/12).



IDN/ANTARA

BAYI ORANG UTAN SUMATERA

Bayi orangutan Sumatra berusia 11 hari bernama Mathai digendong induknya Sari di taman margasatwa, kebun binatang dan kebun raya Pairs Daiza di Brugelette, Belgia, Rabu (9/12).

Lima Orang Dilaporkan Meninggal di Pemilu Ghana

ACCRA(IM)-Pihak kepolisian Ghana mengatakan setidaknya ada lima orang yang meninggal akibat kekerasan terkait pemilu Presiden dan legislatif yang dihelat Senin kemarin. Jumlah itu belum termasuk dari belasan korban cedera lain akibat demonstrasi terburunya.

Mengutip Independent Kamis (10/12) kejadian buruk saat pemilu itu menoreng dan menguji kredensial negara di Afrika Barat tersebut sebagai salah satu negara paling stabil secara politik di benua Afrika.

Berdasarkan informasi dari Layanan Polisi Ghana, ada 21 kekerasan yang diidentifikasi berada di sumber pemilu. Kekerasan yang berujung pada meninggalnya korban jiwa itu juga terjadi saat masa tenang pemilu dan ketika warga masih menunggu hasilnya.

Ratusan pendukung oposisi berdemostrasi kembali Rabu kemarin di gedung Komisi Pemilihan di ibu kota, Accra. Mereka menuntut agar hasil pemilu segera diumumkan. Menanggapi tuntutan

itu, Ketua Komisi Pemilihan Jean Mensah tidak menolaknya dan menegaskan hasil akan segera keluar. Namun pendukung oposisi menuduh komisi menunda hasil untuk mengubah angka.

Dalam pemilihan kali ini, ada 275 kursi anggota parlemen yang dipersebutkan. Selain itu, ada setidaknya 12 calon presiden yang masih bersaing sebelum diumumkan. Di antaranya adalah tokoh nasional termasuk pejawat Nana Addo Dankwa Akufo-Addo (76 tahun) dan mantan presiden John Dramani Mahama (62) yang diramalkan sebagai kandidat terkuat.

Keduanya telah berhadapan dua kali sebelumnya. Mahama memenangkan pemilu 2012, tetapi kalah pada 2016 dari Akufo-Addo. Jika salah satu dari dua pihak itu menang, maka otomatis ia akan menjalani masa jabatan kedua dan terakhir di bawah batasan konstitusional saat ini. Menyangkut hak suara dari warganya, disebutkan ada lebih dari 17 juta orang yang terdaftar dan dijadwalkan memberikan suaranya di lebih dari 38 ribu TPS. ● **gul**